



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BATAM

2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia Nya, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batam Tahun 2025* dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Batam dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Batam.

LKjIP Bappeda Kota Batam Tahun 2025 menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta capaian kinerja yang telah diraih selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan laporan ini mengacu pada dokumen perencanaan daerah, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Batam, Rencana Kerja (Renja), serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

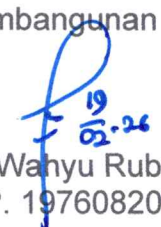
Melalui LKjIP ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif, terukur, dan akuntabel mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kota Batam Tahun 2025, sekaligus menjadi bahan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah pada tahun-tahun selanjutnya.

Penyusunan LKjIP ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama seluruh jajaran Bappeda Kota Batam. Kami menyadari bahwa LKjIP Bappeda Kota Batam Tahun 2025 ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang semakin efektif, efisien, dan akuntabel.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Batam, Februari 2026

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah


Tri Wahyu Rubianto, ST., M.Si
NIP. 19760820 200212 1 008

PARAF HIRARKI	
SEKRETARIS	
KABID/JF AHLI MADYA	
KASUBAG/JF AHLI MUDA <i>Filhi</i>	

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia Nya, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batam Tahun 2025* dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Batam dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Batam.

LKjIP Bappeda Kota Batam Tahun 2025 menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta capaian kinerja yang telah diraih selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan laporan ini mengacu pada dokumen perencanaan daerah, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Batam, Rencana Kerja (Renja), serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Melalui LKjIP ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif, terukur, dan akuntabel mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kota Batam Tahun 2025, sekaligus menjadi bahan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah pada tahun-tahun selanjutnya.

Penyusunan LKjIP ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama seluruh jajaran Bappeda Kota Batam. Kami menyadari bahwa LKjIP Bappeda Kota Batam Tahun 2025 ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang semakin efektif, efisien, dan akuntabel.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Batam, Februari 2026

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah



Tri Wahyu Rubianto, ST., M.Si
NIP. 19760820 200212 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2025 memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan total 5 (lima) indikator kinerja, dan 5 (lima) target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 5 (lima) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 4 target;
2. Target dengan realisasi 100% sebanyak 1 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Daerah		Persentase Kinerja pembangunan daerah yang tercapai	90%	100%	111,11
	Terwujudnya Perencanaan yang Partisipatif, Selaras, dan Transparan.	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	100%	100,00
		Persentase Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	98,42%	100%	101,61
	Meningkatnya Kualitas perencanaan dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD yang peringkat kinerjanya sangat tinggi	22,22%	62,22%	280,02
	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	90,75	91,3	100,61
CAPAIAN KINERJA BAPPEDA					138,67

Kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 18.030.213.829,00 atau 93,49% dari total pagu anggaran sebesar Rp 19.285.996.128,00

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM	2
1.3 ISU-ISU STRATEGIS	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2025-2029.....	11
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	16
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	21
2.4 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	28
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA DAN PERBANDINGAN KINERJA TAHUN 2025.....	32
3.3 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025.....	39
BAB IV PENUTUP	46
4.1 KESIMPULAN	46
4.2 SARAN	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai	3
Tabel 2.1 Matriks Perencanaan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025	12
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	18
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Bappeda Daerah Tahun 2025	22
Tabel 2.4 Rencana Kebutuhan Anggaran Tahun 2025	22
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bappeda Tahun 2025	29
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Program Bappeda Tahun 2025	30
Tabel 3.3 Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi Tujuan dan Sasaran	32
Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2025	39
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran Tahun 2025	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda.....	6
Gambar 3.1 Perbandingan Target/Realisasi Bappeda Kota Batam dengan Kabupaten Banyuwangi.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pencapaian visi misi organisasi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sebagai dokumen yang disusun dan disampaikan secara sistematis untuk melaporkan prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan laporan pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

Penyusunan LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memberikan informasi kinerja yang terukur atas program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2025, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.2 Gambaran Umum

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Sebagai koordinator penyusunan perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyediakan produk perencanaan pembangunan serta informasi spasial kepada publik melalui peta, dengan harapan perencanaan pembangunan kota dapat dilaksanakan berbasis spasial.

Dengan visi Kota Batam Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 yaitu ***“Batam Kota Madani Yang Inovatif, Berbudaya Dan Berkelanjutan Sebagai Pusat Investasi Dan Pariwisata”***, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perannya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah sebagai Perangkat Daerah yang mengacu kepada sasaran kota memiliki tujuan dan sasaran seperti tertuang pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

TUJUAN:

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian kinerja pembangunan daerah

SASARAN:

1. Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, selaras dan transparan;
2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian kinerja perangkat daerah
3. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pada tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam disokong APBD sebesar Rp. 19.285.996.128,00 serta alokasi Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	PNS	53
2	Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	9
	Total	62

Sumber: Data Kepegawaian Bappeda 2025

Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengacu pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Wali Kota Batam Nomor 23 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 23 Tahun 2024 tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan merupakan unsur penunjang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

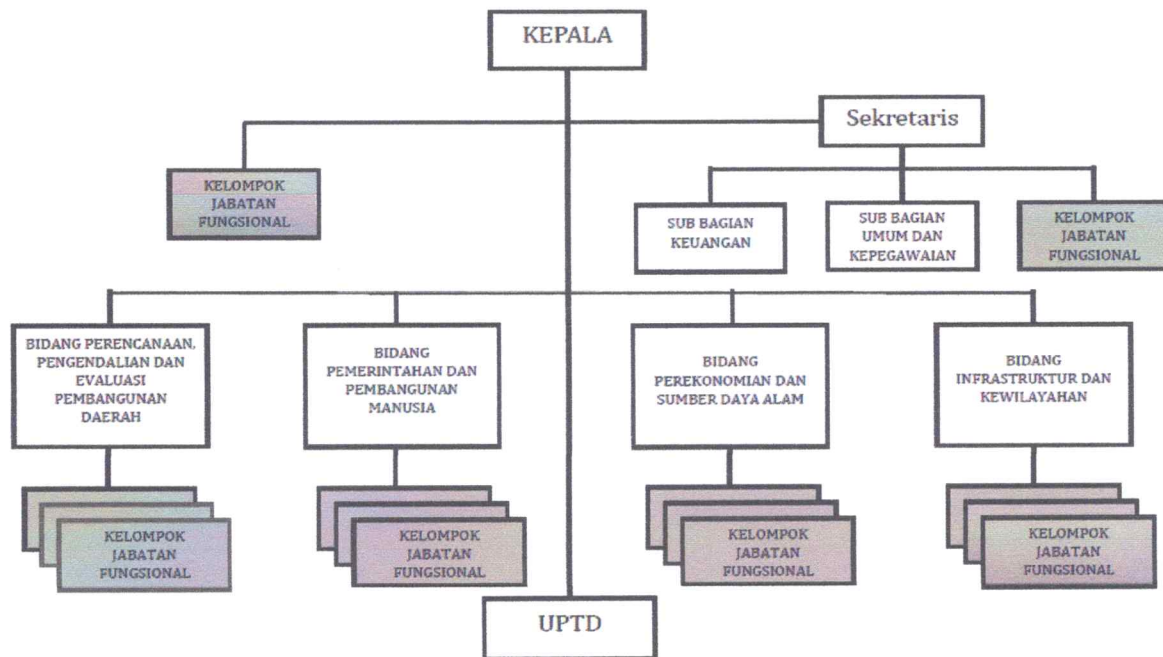
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Badan

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional

- d. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bappeda



1.3 Isu-isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian Tema Pembangunan Kota Batam Tahun 2025 yaitu “Percepatan Peningkatan Daya Saing dan Infrastruktur dalam Pembangunan Berkelanjutan” sebagaimana Peraturan WaliKota Batam Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025.

Aspek strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya mewujudkan visi Kota Batam melalui perencanaan pembangunan yang terpadu sebagai berikut:

1. Adanya kewenangan dalam perencanaan, dimana peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sangat strategis dan memiliki pengaruh yang besar dalam perencanaan pembangunan kota Batam. Kewenangan ini menjadi dasar Bappeda dalam mengkoordinir Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Batam. Penyusunan perencanaan strategis yang dimaksud mencakup penyusunan dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang merupakan tahap berikutnya dari penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD Kota Batam. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mendampingi Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana strategis yang mengikuti kaidah alur perencanaan strategis. Perangkat Daerah melakukan perumusan isu strategis, tujuan, sasaran serta rumusan kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan RPJMD Kota Batam. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas memastikan keselarasan antara dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kota Batam. Demikian pula dengan penyusunan Renja Perangkat Daerah, di mana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dimuat di dalamnya merupakan bagian dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses perencanaan dan monitoring. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi menjadi alat bantu untuk mempercepat proses penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, PK, Rencana Aksi) melalui sistem terintegrasi, sehingga mengurangi pekerjaan manual, duplikasi data, dan potensi kesalahan. Pembangunan dan pengembangan sistem juga perlu diikuti dengan pemahaman dan kemampuan pengguna sistem untuk mengoperasikan sistem

aplikasi perencanaan tersebut. Hal ini akan terus diupayakan melalui sosialisasi pemanfaatan sistem aplikasi kepada PD;

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai koordinator penyediaan data dan informasi pembangunan untuk kebutuhan perencanaan perlu mengoptimalkan kualitas data dan informasi yang dipakai dalam perencanaan pembangunan, serta meningkatkan pemanfaatannya dalam analisa untuk penyusunan perencanaan pembangunan;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan terkait capaian kinerja Perangkat Daerah.

Permasalahan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya adalah sebagai berikut:

- a. Data dan informasi pembangunan belum sepenuhnya dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Ketersediaan data dan informasi pembangunan untuk mendukung perumusan setiap target output/outcome telah diupayakan, namun data dan informasi pembangunan belum banyak dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan maupun strategi perencanaan pembangunan. Upaya pengumpulan data dan informasi pembangunan dalam satu sistem informasi untuk mendukung kebijakan “Satu Data” masih dalam proses identifikasi dan review struktur data. Dengan demikian, perlu adanya komitmen untuk penyempurnaan penyelenggaraan data sehingga mampu menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam aspek perencanaan.
- b. Secara umum, pengetahuan dan kemampuan SDM Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah baik sebagai perencana maupun pengendali mengalami peningkatan secara bertahap. Namun demikian, karena Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban melakukan pendampingan secara intensif kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah, maka perlu terus dilakukan

peningkatan kompetensi SDM Perencana;

- c. Terkait peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terhadap kualitas seluruh dokumen perencanaan yang harus memenuhi kaidah perencanaan strategis, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tetap perlu memastikan ketepatan waktu dokumen perencanaan, serta memperhatikan tahapan-tahapan penyusunan setiap jenis dokumen perencanaan sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai koordinator penyediaan data dan informasi pembangunan untuk kebutuhan perencanaan perlu mengoptimalkan kualitas data dan informasi yang dipakai dalam perencanaan pembangunan, serta meningkatkan pemanfaatannya dalam analisa untuk penyusunan perencanaan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

a. BAB I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Bappeda, aspek strategis, struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi serta sistematika penyajian LKJ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2025.

b. BAB II: Perencanaan Kinerja

Bab ini menjelaskan secara ringkas Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Perjanjian Kinerja tahun 2025.

c. BAB III: Akuntabilitas Kinerja 2025

Bab ini menjelaskan pengukuran capaian kinerja tahun 2025, analisa capaian kinerja dan realisasi anggaran.

d. BAB IV: Penutup

e. LAMPIRAN

Berisi Perjanjian Kinerja APBD Perubahan Tahun 2025 dan data dukung lainnya sesuai kebutuhan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai perencana melakukan peran strategisnya dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang berkualitas. Indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengacu pada RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029, Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja tahun 2025.

2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2025-2029

RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah (PD), RKPD Kota Batam serta pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2025-2029. RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 memuat visi dan misi Wali Kota Batam, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kota Batam. Visi dan misi untuk 5 (lima) tahun diturunkan menjadi tujuan yang memiliki sasaran dan sasaran diturunkan menjadi program, dilaksanakan dengan strategi dan arah kebijakan yang ditentukan di masing-masing tahun.

Program yang direncanakan sesuai arah kebijakan diharapkan mencapai hasil agar sasaran dan tujuan yang dimaksud dapat tercapai pula. Pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan bisa memberi manfaat yang lebih besar sesuai dengan yang direncanakan pada masyarakat Kota Batam. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD, sedangkan kegiatan diturunkan menjadi sub kegiatan.

Visi Wali Kota Batam:

“Batam Kota Madani Yang Inovatif, Berbudaya Dan Berkelanjutan Sebagai Pusat Investasi Dan Pariwisata ”

Untuk mewujudkan visi WaliKota Batam, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Perangkat Daerah mengampu Misi 4:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang *Good Governance*”

Dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, melalui tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Matriks Perencanaan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Program/ Outcome Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Daerah			Persentase Kinerja pembangunan daerah yang tercapai (Persen)	90%
	Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, selaras dan transparan		Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persen)	100%
			Persentase Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah (Persen)	98,42%
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan indikator program prioritas RPJMD dengan RKPD (Dengan Satuan: Persen)	100%
			Persentase komponen masyarakat yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan daerah (Dengan Satuan: Persentase)	100%
		Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan dokumen sesuai dengan tahapan dan tepat waktu (Dengan Satuan: Persen)	100%
		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/ L i n t a s Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Berita Acara)	90
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan: Berita Acara)	2

		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	3
		Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase analisis data dan informasi yang dimanfaatkan (Dengan Satuan: Persen)	100%
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Dengan Satuan: Orang)	150
		Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan (Dengan Satuan: Buku)	1
		Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100%
		Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Dengan Satuan: Laporan)	3
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah		Persentase PD yang peringkat kinerjanya sangat tinggi (Persen)	22,22%
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran bidang PPM (Dengan Satuan: Nilai)	23,22
			rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Bidang perekonomian dan SDA (Dengan Satuan: Nilai)	22,9
			rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan: Nilai)	22,44
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Dengan Satuan: Persen)	100%
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	33
		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Dengan Satuan: Laporan)	1

		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	18
		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Dengan Satuan: Laporan)	2
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (Dengan Satuan: Persen)	100%
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	21
		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian (Dengan Satuan: Laporan)	2
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	9
		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA (Dengan Satuan: Laporan)	2
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan: Persen)	100%
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	15
		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Dengan Satuan: Laporan)	2
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	39

			dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	
		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Dengan Satuan: Laporan)	2
		Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (Nilai)	90,75
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan: Nilai)	75.21
			Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan: Nilai)	92
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu (Dengan Satuan: Persentase)	100%
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	3
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan (Dengan Satuan: Persentase)	100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan: Orang/ bulan)	62
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan: Dokumen)	12
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan: Persentase)	100%
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan: Orang)	6
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Dengan Satuan: Persentase)	100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	5
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1

		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	2
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	12
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan (Dengan Satuan: Persentase)	100%
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan (Dengan Satuan: Unit)	1
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (Dengan Satuan: Unit)	1
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Dengan Satuan: Unit)	42
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan (Dengan Satuan: Persentase)	100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	12
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	9
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Dengan Satuan: Persentase)	100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan: Unit)	1
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan: Unit)	4
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Dengan Satuan: Unit)	71

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah serangkaian indikator kinerja yang terukur dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2025 disusun dengan memperhatikan keselarasan tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sasaran kota seperti tertuang pada RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tugas dan fungsinya untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan mengukur kinerjanya menggunakan indikator kinerja tujuan dan sasaran seperti termuat dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Tahun 2025. Indikator tujuan dan indikator sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah beserta target dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Formula	Definisi Operasional	Target					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian kinerja pembangunan daerah		Persentase Kinerja pembangunan daerah yang tercapai	Persen	Jumlah Indikator Program Prioritas yang tercapai dibagi total Jumlah Indikator Program Prioritas Daerah kali 100	Persentase Kinerja pembangunan daerah yang tercapai adalah proporsi ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Kinerja pembangunan daerah adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai indikator prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Indikator prioritas pembangunan adalah indikator dari program prioritas Perangkat Daerah dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada Tabel III.7 RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029, yang berjumlah 80 program prioritas.	90%	91%	92,50%	93,50%	95%	97%

	Terwujudnya Perencanaan yang Partisipatif, Selaras, dan Transparan.	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	1. Jumlah program RKPD yang selaras dengan RPJMD dibagi total jumlah program RPJMD kali 100	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD adalah proporsi keselarasan dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD. Keselarasan RPJMD dengan RKPD adalah bahwa RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), di mana seluruh program dalam RKPD harus selaras dengan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Program RKPD adalah seluruh program yang tercantum pada dokumen RKPD Kota Batam pada tahun n (tahun berjalan) dan Program RPJMD adalah seluruh program yang tercantum pada dokumen RPJMD pada tahun n (tahun berjalan).	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Persen	2. Jumlah usulan aspirasi masyarakat yang diakomodir di RKPD	Persentase Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah adalah	98,42%	98,62%	98,82%	99,02%	100%	100%

				dibagi total jumlah usulan aspirasi masyarakat kali 100	proporsi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Keterlibatan aktif masyarakat dimaksud, dapat dilakukan baik secara individu maupun kelompok, dalam seluruh proses pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga menciptakan pembangunan yang lebih relevan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Persentase Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah dapat diukur dari persentase usulan aspirasi masyarakat dalam hasil musrenbang Kota Batam yang dapat diakomodir dalam dokumen RKPD.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada bulan Januari 2025, kemudian dilakukan revisi pada bulan September 2025. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah terdapat penetapan Renstra Bappeda Tahun 2025-2029 yang mengakibatkan perubahan dalam isu strategis, tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau alokasi anggaran.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Terwujudnya Perencanaan yang Partisipatif, Selaras, dan Transparan.	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100
		Persentase Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	98,42
2.	Meningkatnya Kualitas perencanaan dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD yang peringkat kinerjanya sangat tinggi	22,22
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	90,75

2.4 Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkanlah anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rencana Kebutuhan Anggaran Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU APBD-PERUBAHAN (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			17.286.258.228,00
	1.PERENCANAAN,PENG ANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		82.088.000,00

		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	82.088.000,00
	2. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		14.372.812.100,00
		2. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	14.333.232.100,00
		3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.580.000,00
	3. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		69.773.000,00
		4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	69.773.000,00
	4. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		756.772.000,00
		5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.496.000,00
		6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	239.957.000,00
		7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.100.000,00
		8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.966.000,00
		9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	434.253.000,00
	5. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		1.522.508.000,00
		10. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	484.095.000,00
		11. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	341.568.000,00
		12. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	696.845.000,00
	6. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		188.234.128,00
		13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.082.000,00

		14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171.152.128,00
	7. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		294.071.000,00
		15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.880.000,00
		16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	204.330.000,00
		17. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.861.000,00
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			1.532.044.900,00
	8. PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN		1.114.865.500,00
		18. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	107.913.000,00
		19. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	249.514.500,00
		20. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	757.438.000,00
	9. ANALIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		257.958.400,00
		21. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	163.394.000,00

		22. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	94.564.400,00
	10. PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		159.221.000,00
		23. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	159.221.000,00
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			467.693.000,00
	11. KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		198.487.000,00
		24. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	19.105.000,00
		25. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1.702.000,00
		26. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9.900.000,00
		27. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	167.780.000,00
	12. KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)		27.913.000,00

		28. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.600.000,00
		29. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	9.325.000,00
		30. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6.699.000,00
		31. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	6.289.000,00
	13. KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		241.293.000,00
		32. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10.323.000,00
		33. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	216.559.000,00
		34. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6.996.000,00
		35. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	7.415.000,00
TOTAL ANGGARAN			19.285.996.128,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berikut diuraikan hasil pengukuran kinerja, analisa capaian kinerja program dan kegiatan serta uraian realisasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam. Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Perhitungan capaian kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Rumus tersebut digunakan mengingat polarisasi dari indikator- indikator yang diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah *higher is better*. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam dilakukan dengan cara antara lain:

- 1) Membandingkan antara target pencapaian indikator tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2025 dengan realisasi kinerja yang telah dicapai;
- 2) Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 secara *series* dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Penjabaran rumusan program, sub kegiatan dan masing-masing indikator mengacu pada dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 dengan tetap memperhatikan keselarasannya terhadap tujuan dan sasaran beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) Wali Kota yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bappeda Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Daerah		Persentase Kinerja pembangunan daerah yang tercapai	90%	100%	111,11
	Terwujudnya Perencanaan yang Partisipatif, Selaras, dan Transparan.	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	100%	100,00
		Persentase Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	98,42%	100%	101,61
	Meningkatnya Kualitas perencanaan dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD yang peringkat kinerjanya sangat tinggi	22,22%	62,22%	280,02
	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	90,75	91,3	100,61
CAPAIAN KINERJA BAPPEDA					138,67

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada level sasaran di atas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian kinerja di atas 100% sebanyak 4 target;
2. Target dengan capaian 100% sebanyak 1 target.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Program Bappeda Tahun 2025

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	KINERJA															
			TARGET 2025	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN TARGET %												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan: Nilai)	Nilai SAKIP Bappeda merupakan hasil penilaian atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja Bappeda oleh Inspektorat Kota Batam	75,21	Nilai	75,21	100,00												
	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan: Nilai)	Berdasarkan Peraturan PD No. 14 Tahun 2017, nilai dihitung menggunakan formula berikut: $ISK = \frac{\text{Total Nilai Persepsi dari seluruh aspek}}{\text{Jumlah Responden} \times \text{Jumlah Aspek}} \times 25$ Nilai skor ISK berkisar pada skala 0-100 dan dikategorikan dalam lima mutu pelayanan: <table><tr><th>Nilai ISK</th><th>Kategori Mutu Pelayanan</th></tr><tr><td>80 - 100</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>70 - 80</td><td>Baik</td></tr><tr><td>60 - 70</td><td>Cukup Baik</td></tr><tr><td>50 - 60</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>0 - 50</td><td>Tidak Baik</td></tr></table>	Nilai ISK	Kategori Mutu Pelayanan	80 - 100	Sangat Baik	70 - 80	Baik	60 - 70	Cukup Baik	50 - 60	Kurang Baik	0 - 50	Tidak Baik	92	Nilai	92,24	100,26
Nilai ISK	Kategori Mutu Pelayanan																	
80 - 100	Sangat Baik																	
70 - 80	Baik																	
60 - 70	Cukup Baik																	
50 - 60	Kurang Baik																	
0 - 50	Tidak Baik																	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran bidang PPM (Dengan Satuan: Nilai)	Rata-rata nilai komponen perencanaan mitra bidang PPM ditambah Rata-Rata Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Mitra Bidang PPM dibagi dua	23,22	Nilai	20,22	87,08												
	rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan: Nilai)	Rata-rata nilai komponen perencanaan mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ditambah Rata-Rata Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dibagi dua	22,90	Nilai	21,37	93,32												
	rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Bidang perekonomian dan SDA (Dengan Satuan: Nilai)	Rata-rata nilai komponen perencanaan mitra bidang Perekonomian dan SDA ditambah Rata-Rata Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Mitra Bidang Perekonomian dan SDA dibagi dua	22,44	Nilai	21,81	97,19												
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan indikator program prioritas RPJMD dengan RKPD (Dengan Satuan: Persen)	Jumlah indikator program prioritas RKPD tahun n (tahun berjalan) yang sesuai dengan indikator program prioritas di RPJMD tahun n (tahun berjalan) dibagi dengan jumlah	100	%	100	100												

		indikator program prioritas di RPJMD tahun n (tahun berjalan) x 100				
	Persentase komponen masyarakat yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan daerah (Dengan Satuan: Persentase)	Jumlah Komponen masyarakat yang hadir dan memberikan masukan di musrenbang tingkat Kota dibagi jumlah komponen masyarakat yang diundang kali 100	100	%	100	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja untuk level di atas dapat diketahui:

1. Terdapat 3 indikator dengan capaian kinerja dibawah 100%
2. Terdapat 3 indikator dengan capaian kinerja 100%
3. Terdapat 1 indikator dengan capaian kinerja di atas 100%

3.2 Analisis Capaian Kinerja dan Perbandingan Kinerja Tahun 2025

Pada Bab 2 telah diuraikan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025. Rumusan tujuan, sasaran dan masing-masing indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 dengan tetap memperhatikan keselarasannya terhadap tujuan dan sasaran beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) Wali Kota yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

a. Perbandingan Capaian Tujuan Kinerja Renstra

Perbandingan capaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tertuang dalam tabel sebagai berikut

Tabel 3.3
Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi Tujuan dan Sasaran

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	TARGET RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2025	REALISASI	REALISASI CAPAIAN (%)
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Daerah		Persentase Kinerja pembangunan daerah yang tercapai	90%	100%	111,11%
	Terwujudnya Perencanaan yang Partisipatif, Selaras, dan Transparan.	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	98,42%	100%	101,61%
	Meningkatnya Kualitas perencanaan dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD yang peringkat kinerjanya sangat tinggi	22,22%	62,22%	280,02%

Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	90,75	91,3	100,61%
CAPAIAN KINERJA BAPPEDA				138,67%

- a. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, **Persentase Kinerja Pembangunan Daerah** sebagai indikator tujuan Bappeda terealisasi sebesar **100%** dari target yang ditetapkan sebesar **90%**. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja berada pada kategori **sangat baik**. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah telah berjalan secara efektif dan akuntabel. Keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan implementasi program dan kegiatan perangkat daerah, serta optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, menjadi faktor utama dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja tersebut. Capaian kinerja yang melampaui target mencerminkan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah telah berorientasi pada hasil (outcome) dan mampu mengarahkan perangkat daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan. Hasil pengukuran kinerja ini selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyempurnaan perencanaan pembangunan daerah pada tahun berikutnya, khususnya dalam penetapan target kinerja yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
- b. Indikator **Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD** pada tahun pelaporan terealisasi sebesar 100 persen dari target yang ditetapkan sebesar 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh tahapan penyusunan RKPD telah dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta sasaran strategis yang tertuang dalam RPJMD. Keselarasan tersebut diperoleh melalui proses sinkronisasi dan verifikasi substansi perencanaan, sehingga tidak terdapat program maupun kegiatan yang menyimpang dari dokumen perencanaan jangka menengah. Dengan demikian, indikator ini mencerminkan kualitas perencanaan yang baik serta mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.
- c. Indikator **Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah** pada tahun pelaporan terealisasi sebesar 100 persen, melampaui target yang

ditetapkan sebesar 98,42 persen. Capaian ini menunjukkan tingginya kemampuan keuangan daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat serta semakin selarasnya antara kebutuhan masyarakat dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Kota Batam. Pencapaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan proses perencanaan yang inklusif, responsif, dan transparan, serta menunjukkan meningkatnya kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Kondisi ini turut mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih aspiratif dan akuntabel.

- d. Indikator ***Persentase Perangkat Daerah (PD) dengan peringkat kinerja sangat tinggi*** menunjukkan realisasi sebesar **62,22%**, melampaui target yang ditetapkan sebesar **22,22%**. Capaian ini mengindikasikan adanya peningkatan signifikan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja pada Perangkat Daerah. Keberhasilan tersebut didukung oleh penguatan sistem pengendalian kinerja, pendampingan dan asistensi berkelanjutan dalam penyusunan perencanaan PD, serta meningkatnya komitmen pimpinan PD dalam menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja. Capaian yang jauh melebihi target ini mencerminkan efektivitas peran koordinatif dan pembinaan yang dilakukan Bappeda dalam mendorong peningkatan kinerja lintas PD secara terukur dan berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut atas capaian indikator *Persentase Perangkat Daerah dengan peringkat kinerja sangat tinggi* yang melampaui target, Bappeda akan melakukan penguatan dan replikasi praktik baik (*best practices*) pada PD berkinerja sangat tinggi agar dapat diadopsi oleh PD lainnya. Selain itu, pendampingan dan asistensi kinerja akan difokuskan pada PD yang belum mencapai peringkat sangat tinggi melalui peningkatan kualitas perencanaan, penyelarasan indikator kinerja, serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis hasil. Bappeda juga akan mendorong konsistensi penerapan SAKIP melalui evaluasi berkala dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi kinerja guna menjaga keberlanjutan capaian serta mendorong peningkatan kinerja Perangkat Daerah secara merata dan berkelanjutan.
- e. Indikator ***Indeks Kepuasan Masyarakat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*** terealisasi sebesar **91,30%**, melampaui target yang ditetapkan sebesar

90,75%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perencanaan, koordinasi, dan fasilitasi pembangunan yang diberikan Bappeda telah memenuhi bahkan melampaui ekspektasi pemangku kepentingan. Hasil tersebut didukung oleh peningkatan responsivitas layanan, kejelasan prosedur pelayanan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan pengaduan, sehingga mampu meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap kinerja Bappeda. Sebagai tindak lanjut, Bappeda akan mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyempurnaan standar pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, serta pemanfaatan hasil survei IKM sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Selain itu, masukan dan saran dari responden survei akan ditindaklanjuti secara sistematis guna meningkatkan aspek pelayanan yang masih perlu disempurnakan, sekaligus menjaga konsistensi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada periode berikutnya.

b. Perbandingan Capaian Sasaran per tahun

Capaian Indikator Meningkatkan Kualitas Perencanaan pada tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena tahun 2025 merupakan tahun pertama Renstra Bappeda Tahun 2025-2029.

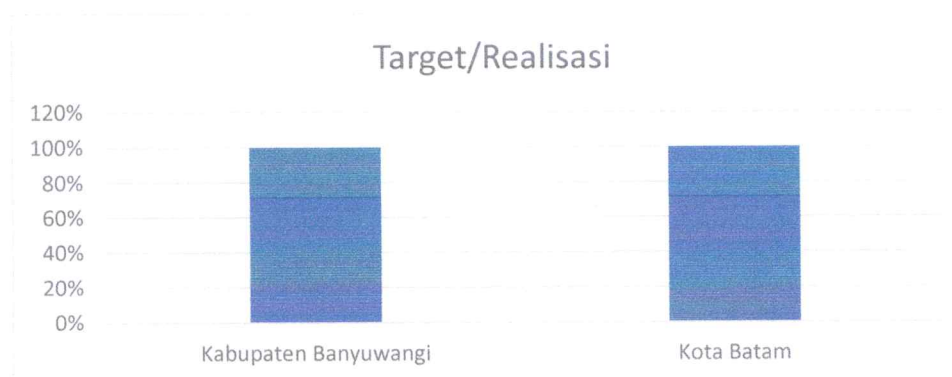
c. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Pemerintah Daerah Lain

IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2025 terdiri dari 1 (satu) indikator tujuan yang diturunkan menjadi 4 (empat) indikator sasaran sebagai berikut:

- a.** Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian kinerja pembangunan daerah yang diukur melalui indikator *persentase kinerja pembangunan daerah yang tercapai* menunjukkan **realisasi 100% dari target 100%**. Capaian ini menegaskan bahwa proses perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja pembangunan daerah telah berjalan secara efektif dan konsisten. Jika dibandingkan dengan **Bappeda Kabupaten Banyuwangi** yang juga menetapkan **target 100%** pada indikator yang sama (Renstra Bappeda Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2029), kinerja

Bappeda berada pada tingkat yang setara dengan daerah rujukan nasional yang dikenal memiliki praktik perencanaan dan pengendalian kinerja yang kuat. Kesetaraan capaian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelarasan dokumen perencanaan, penguatan monitoring dan evaluasi, serta pengendalian kinerja berbasis indikator hasil telah diterapkan secara optimal. Keunggulan kinerja tersebut didukung oleh meningkatnya kualitas koordinasi lintas perangkat daerah, konsistensi tindak lanjut hasil evaluasi, serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan. Dengan demikian, capaian ini tidak hanya mencerminkan pemenuhan target kinerja, tetapi juga memperlihatkan kematangan tata kelola perencanaan dan pengendalian kinerja pembangunan daerah yang berkelanjutan dan sejajar dengan praktik terbaik (*best practices*) daerah berprestasi.

Gambar 3.1
Perbandingan Target/Realisasi Bappeda Kota Batam
dengan Kabupaten Banyuwangi



Sasaran yang diturunkan dari tujuan tersebut terdiri dari 4 (empat) indikator:

- a. Terwujudnya Perencanaan yang Partisipatif, Selaras, dan Transparan. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur ketercapaian sasaran ini adalah:
 1. persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD . Target yang ditetapkan dalam indikator ini yaitu 100% dengan realisasi 100%.

2. Persentase Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Target 98,42% dengan realisasi 100%.

- b. Meningkatnya Kualitas perencanaan dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur ketercapaian sasaran ini adalah persentase PD yang peringkat kinerjanya sangat tinggi. Target yang ditetapkan 22,22% dengan realisasi 62,22%
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur ketercapaian sasaran ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Target yang ditetapkan 90,75 dengan realisasi 91,30 sehingga capaian sebesar 100,61%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan telah memenuhi dan melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Apabila dibandingkan dengan **Bappeda Kabupaten Banyuwangi** yang menetapkan target IKM sebesar **94,89**, perbedaan target tersebut mencerminkan adanya perbedaan kondisi awal (*baseline*), karakteristik pengguna layanan, serta kebijakan penetapan standar pelayanan pada masing-masing daerah, sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung hanya berdasarkan besaran target numerik.

Keunggulan kinerja Bappeda ditunjukkan oleh keberhasilan melampaui target IKM yang telah ditetapkan secara realistis dan terukur sesuai dengan kondisi pelayanan yang ada. Hal ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan peningkatan kualitas pelayanan, pelaksanaan standar pelayanan, serta mekanisme evaluasi dan tindak lanjut hasil survei telah berjalan secara efektif. Capaian ini juga mencerminkan komitmen Bappeda dalam menjaga konsistensi kualitas pelayanan publik kepada pemangku kepentingan.

Ke depan, peluang peningkatan kualitas pelayanan dapat diarahkan melalui penyesuaian target IKM yang lebih progresif secara bertahap, dengan mempertimbangkan praktik baik daerah pembanding seperti Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, pemanfaatan hasil survei IKM secara lebih mendalam,

hususnya pada unsur pelayanan yang masih memerlukan perbaikan, serta penguatan inovasi dan digitalisasi layanan diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan secara berkelanjutan.

d. Prestasi Lainnya

Pada tahun 2025 Bappeda Kota Batam mendapatkan juara 3 pada penghargaan inovasi daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Batam dengan kategori PD terinovatif.

3.3 Realisasi Anggaran 2025

Alokasi anggaran untuk Bappeda Kota Batam pada P-APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 19.285.996.128,00

Pada Tabel di bawah ditampilkan seluruh realisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 dan indikator program sesuai RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dan Renstra Bappeda Tahun 2025-2029. Realisasi anggaran belanja yang mendukung pencapaian target indikator sebesar Rp. 18.030.213.829,00 atau 93,49%.

Gambaran alokasi anggaran dan realisasi belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU APBD- PERUBAHAN (Rp)	REALIALISASI KEUANGAN	
				(Rp)	(%)
			19.285.996.128,00	18.030.213.829,00	93,49
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			17.286.258.228,00	16.224.055.861,00	93,86
	1.PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		82.088.000,00	69.162.743,00	84,25
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	82.088.000,00	69.162.743,00	84,25
	2. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		14.372.812.100,00	13.662.962.620,00	95,06
		2. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	14.333.232.100,00	13.625.782.620,00	95,06
		3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.580.000,00	37.180.000,00	93,94
	3. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		69.773.000,00	54.684.500,00	78,37
		4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	69.773.000,00	54.684.500,00	78,37
	4. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		756.772.000,00	656.985.420,00	86,81
		5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.496.000,00	10.976.000,00	95,48

		6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	239.957.000,00	215.559.250,00	89,83
		7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.100.000,00	18.500.000,00	87,68
		8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.966.000,00	38.095.300,00	76,24
		9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	434.253.000,00	373.854.870,00	86,09
	5. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		1.522.508.000,00	1.402.350.000,00	92,11
		10. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	484.095.000,00	423.600.000,00	87,50
		11. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	341.568.000,00	321.900.000,00	94,24
		12. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	696.845.000,00	656.850.000,00	94,26
	6. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		188.234.128,00	143.426.878,00	76,20
		13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.082.000,00	2.953.720,00	17,29
		14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171.152.128,00	140.473.158,00	82,08
	7. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN		294.071.000,00	234.483.700,00	79,74

	PEMERINTAHAN DAERAH				
		15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.880.000,00	29.300.000,00	71,67
		16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	204.330.000,00	157.902.700,00	77,28
		17. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.861.000,00	47.281.000,00	96,77
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			1.532.044.900,00	1.435.411.434,00	93,69
	8. PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN		1.114.865.500,00	1.034.336.234,00	92,78
		18. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	107.913.000,00	96.258.424,00	89,20
		19. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	249.514.500,00	229.364.850,00	91,92
		20. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	757.438.000,00	708.712.960,00	93,57
	9. ANALIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		257.958.400,00	242.773.200,00	94,11

		21. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	163.394.000,00	156.430.200,00	95,74
		22. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	94.564.400,00	86.343.000,00	91,31
	10. PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		159.221.000,00	158.302.000,00	99,42
		23. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	159.221.000,00	158.302.000,00	99,42
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			467.693.000,00	370.746.534,00	79,27
	11. KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		198.487.000,00	174.035.000,00	87,68
		24. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	19.105.000,00	18.440.000,00	96,52
		25. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1.702.000,00	1.645.000,00	96,65

		26. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9.900.000,00	9.600.000,00	96,97
		27. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	167.780.000,00	144.350.000,00	86,04
	12. KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)		27.913.000,00	27.034.000,00	96,85
		28. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.600.000,00	5.400.000,00	96,43
		29. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	9.325.000,00	9.076.000,00	97,33
		30. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6.699.000,00	6.487.000,00	96,84
		31. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	6.289.000,00	6.071.000,00	96,53

	13. KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		241.293.000,00	169.677.534,00	70,32
		32. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10.323.000,00	9.769.000,00	94,63
		33. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	216.559.000,00	146.234.534,00	67,53
		34. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6.996.000,00	6.784.000,00	96,97
		35. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	7.415.000,00	6.890.000,00	92,92
TOTAL ANGGARAN			19.285.996.128,00	18.030.213.829,00	93,49

Tabel 3. 5
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja pembangunan daerah yang tercapai	90%	100%	111,11	19.285.996.128	18.030.213.829	93,49
Terwujudnya Perencanaan yang Partisipatif, Selaras, dan Transparan.	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	100%	100,00	417.179.400	401.075.200	96,14
	Persentase Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	98,42%	100%	101,61	1.114.865.500	1.034.336.234	92,78
Meningkatnya Kualitas perencanaan dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD yang peringkat kinerjanya sangat tinggi	22,22%	62,22%	280,02	467.693.000	370.746.534	79,27
Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	90,75	91,3	100,61	17.286.258.228	16.224.055.861	93,86

Berdasarkan tabel di atas untuk capaian realisasi kinerja dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2025 dalam kategori sangat baik.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Analisis Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 138,67%.
2. Secara keseluruhan capaian output kegiatan Tahun 2025 dan penyerapan anggaran sebesar 93,49%. Capaian output kegiatan Tahun 2025 tercapai seluruhnya dengan penyerapan anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mencapai hasil yang sangat optimal.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025, maka tindak lanjut dan upaya yang dapat dilaksanakan pada masa mendatang sehingga dapat mempertahankan kinerja, sebagai berikut:

1. Dalam proses penyusunan RPJMD dan RPJPD lebih memperhatikan data capaian sebelumnya, hal ini dilakukan agar penentuan target bisa lebih rasional dan juga memperhatikan program dan kegiatan prioritas;
2. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang ideal dan berbasis Manajemen Strategis (deployment dan alignment), Manajemen Kinerja (mengevaluasi pelaksanaan dari tujuan yang ditetapkan) serta berbasis resiko (kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan) untuk mendapatkan perencanaan strategis yang berkualitas;
3. Memperhatikan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk meningkatkan kualitas pengumpulan serta analisa data dan informasi untuk mendukung kualitas perencanaan, maka dalam hal penyediaan data dan informasi sesuai standar perlu ditentukan SOP terkait pemenuhan data dan informasi sebagai bahan dasar perumusan perencanaan;

5. Selalu melakukan pemutakhiran (update, wawasan dan kemampuan yang mengacu pada kondisi terkini dan peraturan terbaru terkait perencanaan pembangunan kota);
6. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setiap bulan, triwulan dan tahunan untuk mengevaluasi capaian penyusunan dokumen pendukung.

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BATAM**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI WAHYU RUBIANTO, S.T., M.Si
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AMSAKAR ACHMAD
Jabatan : Wali Kota Batam
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batam, 2 September 2025

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

AMSAKAR ACHMAD

TRI WAHYU RUBIANTO, S.T., M.Si
NIP.197608202002121008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BATAM

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Terwujudnya Perencanaan yang Partisipatif, Selaras, dan Transparan.	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100
		2. Persentase Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	98,42
2.	Meningkatnya Kualitas perencanaan dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD yang peringkat kinerjanya sangat tinggi	22,22
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	90,75

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	467.693.000,00	APBD-P
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.532.044.900,00	APBD-P
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.286.258.228,00	APBD-P
Jumlah Anggaran		19.285.996.128,00	

Wali Kota Batam



AMSAKAR ACHMAD

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah



TRI WAHYU RUBIANTO, S.T., M.Si
NIP.197608202002121008